

***PROCEDURES FOR ISSUING BUSINESS IDENTIFICATION
NUMBERS (NIB) FOR MSMES VIA ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS) WITH THE APPLICATION OF
ACCOUNTING PRINCIPLES AT THE DEPARTMENT OF
INVESTMENT AND ONE-STOP INTEGRATED SERVICES
(DPM-PTSP) OF JAMBI PROVINCE***

***PROSEDUR PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
BAGI PELAKU UMKM MELALUI ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS) DENGAN PENERAPAN PRINSIP
AKUNTANSI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM PTSP) PROVINSI
JAMBI***

*Yohana Putri Lopian Sinambela¹⁾**

Dios Nugraha Putra²

1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

2) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

**) Korespondensi*

*E-mail: yohana1@gmail.com^{*1)}*

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a significant role in economic development; however, many still lack formal business legality, particularly the Business Identification Number (NIB). The government has introduced the Online Single Submission (OSS) system as an integrated electronic business licensing platform to simplify the registration process. This study aims to analyze the procedure for obtaining an NIB through the OSS system and to examine the role of accounting principles in supporting MSMEs during the registration process at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPM PTSP) of Jambi Province. This research employs a qualitative descriptive method using observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the NIB registration procedure has been implemented in accordance with regulations.

Keywords: *MSMEs, Business Identification Number (NIB), Online Single Submission (OSS), Accounting Principles*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Pemerintah telah menyediakan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembuatan NIB melalui OSS serta mengkaji peran prinsip akuntansi dalam mendukung proses tersebut di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran NIB melalui OSS telah berjalan sesuai ketentuan.

Kata Kunci: UMKM, NIB, OSS, Prinsip Akuntansi, Pelayanan Publik Digital

1. PENDAHULUAN

Transformasi sistem perizinan berusaha di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan diterapkannya sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menegaskan bahwa perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui sistem elektronik. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, efisiensi pelayanan publik, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam konteks tersebut, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi identitas legal utama yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salman Al Farisi, Fasa, dan Suharto (2021) menyatakan bahwa UMKM berkontribusi signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha secara formal. Asnaini dkk. (2022) menegaskan bahwa sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan UMKM agar mampu bersaing secara legal dan berkelanjutan.

Dalam perspektif akuntansi, pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung legalitas usaha. Prinsip akuntansi berfungsi sebagai landasan dalam proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan secara sistematis (Suwardjono, 2016). Prinsip entitas ekonomi menegaskan bahwa kegiatan usaha harus dipisahkan dari kepentingan pribadi pemilik (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019). Prinsip kesinambungan usaha menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi entitas akan terus beroperasi dalam jangka panjang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Selain itu, prinsip biaya historis mengharuskan aset dicatat berdasarkan harga perolehan yang dapat diukur secara andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023), sedangkan prinsip konsistensi menghendaki penggunaan metode akuntansi yang tetap antarperiode agar laporan dapat dibandingkan (Warren, Reeve, & Duchac, 2017).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi langsung terhadap proses pendaftaran NIB melalui OSS. Laporan keuangan yang disusun secara sistematis membantu pelaku UMKM dalam menyediakan informasi terkait modal, omzet, dan skala usaha saat melakukan pengisian data pada sistem OSS. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya pencatatan keuangan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi akuntansi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas legalisasi usaha berbasis digital.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS serta mengkaji peran penerapan prinsip akuntansi dalam mendukung kelancaran proses legalisasi usaha bagi pelaku UMKM.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

UMKM merupakan pilar ekonomi nasional yang memiliki karakteristik khusus. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kriteria UMKM kini lebih ditekankan pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Bagi UMKM, memiliki legalitas bukan sekadar kepatuhan hukum, melainkan syarat utama untuk mengakses pembiayaan perbankan, bantuan pemerintah, dan perluasan pasar. Minimnya pemahaman teknologi dan ketidakteraturan pencatatan keuangan seringkali menjadi kendala dalam proses sertifikasi.

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menegaskan bahwa seluruh proses perizinan dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal utama pelaku usaha yang berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, akses kepabeanaan, serta identitas dalam kegiatan usaha. Implementasi OSS di tingkat daerah dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang perizinan.

Dalam konteks pengembangan usaha, UMKM memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional. Salman Al Farisi, Fasa, dan Suharto (2021) menjelaskan bahwa UMKM berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Namun demikian, legalitas usaha masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku UMKM. Asnaini dkk. (2022) menyatakan bahwa pembuatan NIB melalui OSS menjadi langkah strategis dalam mendorong formalitas usaha dan meningkatkan daya saing UMKM.

Dari perspektif akuntansi, penyusunan laporan keuangan yang baik merupakan bagian penting dalam mendukung legalitas usaha. Suwardjono (2016) menyatakan bahwa prinsip akuntansi berfungsi sebagai landasan dalam proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan secara sistematis dan dapat dipercaya. Prinsip entitas ekonomi menegaskan bahwa kegiatan usaha harus dipisahkan dari kepentingan pribadi pemilik, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019). Prinsip kesinambungan usaha menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi entitas akan terus beroperasi dalam jangka panjang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Selain itu, prinsip biaya historis mengharuskan aset dicatat berdasarkan harga perolehan yang dapat diukur secara andal, sedangkan prinsip konsistensi menekankan penggunaan metode akuntansi yang tetap antarperiode agar laporan dapat dibandingkan (Warren, Reeve, & Duchac, 2017).

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi tersebut sangat relevan bagi UMKM, terutama dalam memenuhi persyaratan administratif pada sistem OSS. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016) dirancang untuk membantu UMKM menyusun laporan keuangan secara sederhana namun tetap sesuai standar. Dengan adanya pencatatan transaksi yang tertib, pelaku UMKM dapat mengetahui jumlah modal, omzet, serta kondisi keuangan usaha secara lebih akurat, yang kemudian mempermudah proses pengisian data pada sistem OSS.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas implementasi sistem perizinan elektronik dipengaruhi oleh kesiapan administrasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur yang berlaku. Kajian mengenai kebijakan pengurusan NIB pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa legalitas usaha berbasis OSS membutuhkan kesiapan dokumen dan pemahaman administratif dari pelaku usaha (Garpy & Wahyudi, 2023). Selain itu, rendahnya literasi akuntansi pada UMKM dapat menjadi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang diperlukan dalam proses legalisasi usaha.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dikembangkan hipotesis penelitian bahwa penerapan prinsip akuntansi berpengaruh positif terhadap kelancaran proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission. Hipotesis ini dibangun atas asumsi bahwa semakin baik penerapan prinsip entitas ekonomi, kesinambungan usaha, biaya historis, dan konsistensi dalam pencatatan keuangan UMKM, maka semakin mudah pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis pada sistem OSS.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta mengkaji peran penerapan prinsip akuntansi dalam mendukung proses tersebut pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui observasi dan wawancara dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jambi serta pelaku UMKM yang melakukan pendaftaran NIB. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta dokumen pendukung terkait prosedur pendaftaran NIB dan penerapan prinsip akuntansi pada UMKM. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari pihak internal instansi, pelaku usaha, serta dokumen resmi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan pendaftaran NIB di DPM PTSP Provinsi Jambi, wawancara dengan informan yang terlibat dalam proses pelayanan dan pelaku UMKM, serta studi pustaka untuk memperkuat landasan teori dan kerangka konseptual penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung alur prosedur pendaftaran melalui sistem OSS, sedangkan wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai kendala yang dihadapi serta peran pencatatan keuangan dalam proses legalisasi usaha.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan antara penerapan prinsip akuntansi dan kelancaran proses pendaftaran NIB melalui OSS.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan indikator penerapan prinsip akuntansi yang meliputi pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan modal dan aset berdasarkan biaya historis, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta konsistensi pencatatan transaksi. Kelancaran proses pendaftaran NIB diukur berdasarkan kemudahan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan administratif, kelengkapan data usaha yang diinput dalam sistem OSS, serta minimnya kendala dalam proses verifikasi dan penerbitan NIB. Analisis terhadap indikator tersebut digunakan untuk menilai hubungan antara penerapan prinsip akuntansi dan efektivitas proses legalisasi usaha.

4. HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Proses pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS dengan tahapan pembuatan akun, pengisian data identitas pelaku usaha, penginputan data usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), hingga penerbitan NIB secara otomatis setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Secara empiris, prosedur yang diterapkan telah berjalan efektif dari sisi sistem dan regulasi. Sistem OSS mampu mempercepat proses legalisasi usaha dibandingkan mekanisme perizinan konvensional. Pelaku usaha tidak lagi harus melalui proses administratif berlapis karena sistem telah terintegrasi antarinstansi. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa sebagian pelaku usaha masih mengalami kendala dalam pengisian data usaha, terutama terkait informasi modal, omzet tahunan, serta pemilihan kode KBLI yang sesuai dengan jenis kegiatan usaha.

Kendala tersebut berkaitan erat dengan rendahnya literasi administratif dan pencatatan keuangan pada sebagian UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, sehingga kesulitan menentukan besaran modal awal dan nilai aset usaha secara pasti. Selain itu, sebagian UMKM belum menyusun laporan laba rugi sederhana maupun pencatatan transaksi harian secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan proses pengisian data pada sistem OSS menjadi kurang optimal dan berpotensi menimbulkan kesalahan klasifikasi usaha.

Dalam konteks penerapan prinsip akuntansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang telah menerapkan prinsip entitas ekonomi, biaya historis, kesinambungan usaha, dan konsistensi pencatatan cenderung lebih mudah dalam menyelesaikan proses pendaftaran NIB. Pemisahan dana pribadi dan dana usaha membantu pelaku usaha dalam mengidentifikasi modal dan arus kas secara lebih jelas. Pencatatan aset berdasarkan biaya historis memudahkan penentuan nilai investasi awal usaha. Konsistensi pencatatan transaksi memungkinkan pelaku usaha mengetahui omzet dan skala usaha secara akurat, yang menjadi salah satu informasi penting dalam sistem OSS.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi tidak hanya berdampak pada pengelolaan keuangan internal, tetapi juga berperan dalam mendukung kepatuhan administratif dan legalitas usaha. Secara kritis dapat dianalisis bahwa digitalisasi perizinan melalui OSS membutuhkan kesiapan data yang bersumber dari praktik akuntansi dasar. Dengan kata lain, efektivitas sistem digital sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi keuangan yang dimiliki pelaku usaha.

Untuk memperjelas hubungan antara penerapan prinsip akuntansi dan kelancaran proses pendaftaran NIB, berikut disajikan rangkuman temuan penelitian:

Aspek yang Dianalisis	Kondisi Empiris	Dampak terhadap Pendaftaran NIB
Prosedur OSS	Sistem terintegrasi dan sesuai regulasi	Proses lebih cepat dan efisien
Literasi Digital UMKM	Masih bervariasi	Sebagian mengalami kesulitan pengisian data
Pemisahan Keuangan	Belum seluruh UMKM menerapkan	Kesulitan menentukan modal dan omzet
Pencatatan Aset	Sebagian belum terdokumentasi baik	Hambatan dalam pengisian data usaha
Konsistensi Laporan	Belum dilakukan secara rutin	Informasi usaha kurang akurat
Penerapan Prinsip Akuntansi	UMKM yang menerapkan lebih tertib	Proses pendaftaran NIB lebih lancar

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi kelancaran proses pendaftaran NIB bukan terletak pada sistem OSS itu sendiri, melainkan pada kesiapan administratif dan penerapan prinsip akuntansi oleh pelaku UMKM. Sistem telah menyediakan kemudahan secara struktural, namun

kualitas input data sangat bergantung pada kapasitas pelaku usaha dalam menyusun informasi keuangan secara sistematis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa penerapan prinsip akuntansi berpengaruh positif terhadap kelancaran proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha melalui OSS. Semakin baik penerapan pencatatan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi, semakin mudah pelaku UMKM memenuhi persyaratan administratif dan menyelesaikan proses legalisasi usaha secara efektif.

5. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural sistem Online Single Submission (OSS) telah dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Implementasi sistem ini di DPM PTSP Provinsi Jambi telah berjalan sesuai regulasi dan mampu mempercepat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Secara normatif, sistem OSS telah memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan integrasi antarinstansi. Namun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa efektivitas sistem tidak sepenuhnya ditentukan oleh kualitas teknologi atau regulasi, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesiapan administratif pelaku UMKM.

Temuan ini relevan dengan pandangan Suwardjono (2016) yang menyatakan bahwa informasi akuntansi harus disusun secara sistematis agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks pendaftaran NIB melalui OSS, informasi mengenai modal, omzet, dan aset usaha merupakan bagian penting dalam pengisian data. Ketika pelaku UMKM belum menerapkan prinsip entitas ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Kieso, Weygandt, dan Warfield (2019), terjadi pencampuran antara keuangan pribadi dan usaha yang berdampak pada ketidakakuratan data. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi bukan hanya relevan dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga memiliki implikasi administratif dalam sistem perizinan digital.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa UMKM yang telah menerapkan prinsip biaya historis dan konsistensi pencatatan cenderung lebih mudah dalam menentukan nilai modal dan omzet usaha. Hal ini sejalan dengan Ikatan Akuntan Indonesia (2023) yang menegaskan bahwa pengukuran aset berdasarkan biaya perolehan memberikan dasar yang andal dan objektif dalam penyajian informasi keuangan. Selain itu, konsistensi metode akuntansi sebagaimana dijelaskan oleh Warren, Reeve, dan

Duchac (2017) memungkinkan laporan keuangan dapat dibandingkan antarperiode, sehingga pelaku usaha lebih mudah mengetahui perkembangan usahanya. Dengan demikian, penerapan prinsip akuntansi berkontribusi langsung terhadap kesiapan data yang diperlukan dalam sistem OSS.

Penelitian terdahulu oleh Asnaini dkk. (2022) menekankan pentingnya sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB bagi UMKM. Sementara itu, Garpy dan Wahyudi (2023) menunjukkan bahwa kebijakan pengurusan NIB pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan kesiapan administratif dari pelaku usaha. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut, namun memberikan perspektif tambahan bahwa kesiapan administratif yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pemahaman prosedur, tetapi juga dengan penerapan praktik akuntansi dasar dalam pengelolaan usaha. Dengan kata lain, literasi akuntansi menjadi variabel kunci yang sebelumnya belum banyak dikaji secara spesifik dalam konteks OSS dan NIB.

Secara argumentatif, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik melalui OSS tidak dapat dilepaskan dari kapasitas manajerial dan akuntansi pelaku usaha. Sistem yang terintegrasi dan berbasis risiko tetap membutuhkan data yang valid dan terstruktur. Ketika pelaku UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang tertib sesuai dengan SAK EMKM yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2016), maka potensi kemudahan yang ditawarkan sistem OSS menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan perizinan digital tidak hanya ditentukan oleh desain regulasi, tetapi juga oleh kesiapan internal pelaku usaha dalam mengelola informasi keuangan.

Kebaruan temuan penelitian ini terletak pada integrasi antara perspektif akuntansi dan kebijakan perizinan berbasis digital. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek regulasi dan implementasi sistem OSS atau pada penguatan UMKM secara umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran proses legalisasi usaha melalui OSS. Dengan demikian, literasi akuntansi dasar dapat diposisikan sebagai faktor pendukung utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan perizinan berbasis elektronik.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperluas pemahaman bahwa prinsip akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pendukung tata kelola usaha dan kepatuhan administratif dalam era digitalisasi pelayanan publik. Temuan ini memberikan implikasi bahwa program pendampingan UMKM tidak cukup hanya berfokus pada

aspek legal formal, tetapi perlu diintegrasikan dengan edukasi akuntansi praktis agar proses legalisasi usaha dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) di DPM PTSP Provinsi Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara struktural mampu memberikan kemudahan serta efisiensi dalam proses legalisasi usaha. Namun demikian, efektivitas implementasi OSS tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem dan regulasi, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesiapan administratif dan kualitas informasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi, khususnya prinsip entitas ekonomi, biaya historis, kesinambungan usaha, dan konsistensi, berperan positif dalam mendukung kelancaran proses pendaftaran NIB. Semakin tertib pencatatan keuangan yang dilakukan UMKM, semakin mudah pelaku usaha memenuhi persyaratan administratif dalam sistem OSS.

Temuan ini memberikan sumbangan konseptual dengan menegaskan bahwa prinsip akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pendukung efektivitas kebijakan perizinan berbasis digital. Penelitian ini memperluas kajian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek regulasi dan implementasi OSS, dengan menunjukkan bahwa literasi akuntansi merupakan faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan legalisasi usaha. Dengan demikian, penelitian ini memunculkan gagasan bahwa integrasi antara digitalisasi pelayanan publik dan penguatan kapasitas akuntansi UMKM merupakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mendorong formalitas usaha.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai keterkaitan antara akuntansi dan kebijakan publik, khususnya dalam konteks digital governance. Prinsip-prinsip akuntansi yang selama ini dipahami dalam kerangka pelaporan keuangan internal, dalam penelitian ini terbukti memiliki relevansi eksternal terhadap kepatuhan administratif dan tata kelola usaha. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait agar program sosialisasi dan pendampingan OSS tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga mencakup edukasi pencatatan keuangan sederhana sesuai dengan SAK EMKM. Penguatan literasi akuntansi dasar dapat menjadi strategi preventif untuk mengurangi kesalahan input data serta meningkatkan kualitas legalisasi usaha UMKM.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lingkup penelitian yang terbatas pada satu instansi di tingkat provinsi, sehingga generalisasi temuan masih bersifat kontekstual. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif tingkat pengaruh masing-masing prinsip akuntansi terhadap kelancaran proses pendaftaran NIB. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif dengan model analisis statistik untuk menguji hubungan antarvariabel secara lebih empiris. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas lokasi penelitian pada beberapa daerah untuk memperoleh gambaran komparatif mengenai implementasi OSS dan kesiapan akuntansi UMKM secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, A. P., Azis, A. D., Rahman, K., & Fakhira, A. N. (2025). Do IT committee and ERP adoption affect a firm's profitability? Banking evidence from Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(4), 346–359.
- Adila, A. P., & Hidayah, R. (2023). Analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah adopsi tata kelola teknologi informasi (pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7), 5223–5233.
- Asnaini, S. W., dkk. (2022). Sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di BUMDes Serdang Tirta Kencana melalui Online Single Submission. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 73–80.
- Bahari, S. F. A., Komalasari, S. P., Adila, A. P., Audina, D., Trimuliani, D., Ramadhani, F., Marta, N., Syukrihadilrsyad, M., & Febrian, R. (2023). *Audit sistem informasi: Suatu pendekatan kontemporer*. Rajawali Pers.
- Farisi, S. A., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 77–88.
- Garpy, P. F., & Wahyudi, A. R. E. (2023). Kebijakan pengurusan NIB pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 341–350. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.313>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Accounting*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. (2016). *Teori akuntansi: Perekayasaan pelaporan keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2017). *Accounting*. Boston, MA: Cengage Learning.